

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Serta Memnuhi  
Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**OLEH**

**SYAHRUL RAMADHAN**  
**NIM. 10576002283**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Riau yang memiliki pendapatan asli daerah yang tergolong besar bila dibandingkan dengan Kabupaten lain. Tapi tingkat kinerja pemerintah di Kabupaten Bengkalis masih rendah terutama Pemerintah Desa yang dulunya kurang diperhatikan, oleh karena itu sudah sewajarnya peningkatan kinerja pemerintah desa merupakan perhatian semua pihak terutama pemerintah daerah, dalam hal ini salah satunya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Untuk menyusun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ **ANALISIS FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DIKECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS** ”.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang di hadapi dalam peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data penyusun menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis. Metode analisis data yang digunakan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, penilaian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Tujuan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa adalah agar Pemerintah Desa dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena semuanya terlihat pada pelayanan publik terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa BPMPD membuat dan melaksanakan beberapa program diantaranya pemberian informasi yakni dengan pemberian koran gratis dan sebagainya yang berkaitan dengan informasi Pemerintah Desa, diadakanya pelatihan – pelatihan diantaranya pelatihan Kepala Desa, administrasi Desa, perangkat Desa, tata naskah, pembuatan perdes dan lain – lain, setelah berakhirnya pelatihan dilakukan pengawasan dan evaluasi guna melihat sejauh mana perkembangan dan kekurangan, sebagai mediator BPMPD juga sebagai wadah pelaksanaan upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa tersebut, serta melengkapi fasilitas pendukung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa selain dalam melakukan atau mengadakan pelatihan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal harus dibantu dengan fasilitas – fasilitas pendukung yakni diantaranya perlengkapan sarana kerja, tunjangan – tunjangan dan sebagainya yang bertujuan memotivasi pemerintah Desa dalam bekerja. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dari tahun ketahun selalu positif, hal ini terlihat sudah mulai terlayannya kebutuhan publik, sifat kritis pemerintah desa dan mulai terciptanya perbaikan administrasi. Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa memang menjadi target utama BPMPD terutama dibidang pemerintahan desa dan dibidang ketahanan Masyarakat karena Kepala Desa dan Perangkat –perangkatnya lah yang akan menggerakkan kehidupan desa dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Akhirnya dapat disimpulkan dengan peran yang baik oleh BPMPD maka tingkat kinerja Aparatur pemerintah Desa akan menjadi lebih baik pula, sehingga mereka tau apa tugas dan fungsinya.

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PERSETUJUAN

### LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Sistematika penulisan .....	13

### BAB II KONSEP TEORITIS

A. Fungsi Badan Pemberdayaan Desa.....	14
B. Peningkatan Aparatur Pemerintahan .....	21
C. Pengertian Aparatur Pemerintahan.....	24
D. Hipotesis .....	27

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Sumber Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sample .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis Data.....	34

### BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Bengkalis .....	35
-------------------------------------------	----

### BAB V PEMBAHASAN

A. Identitas Responden .....	43
B. Melaksanakan Fungsi BPMPD.....	45
C. Upaya BPMPD Dalam Peningkatan Kerja.....	46

D. Memberikan Fasilitas Pendukung.....	59
E. Kendala Yang di Hadapi BPMPD .....	62
F. Kendala dan Tujuan Utama.....	63

## **BABVI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran.....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang Masalah**

Kepala desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang merupakan alat pemerintah pusat sekaligus alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa itu sendiri dalam rangka menyukseskan pembangunan. Berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung beberapa faktor, antara lain : segi politik, sosial budaya, dan ekonomi, hal itu akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat di dalam suatu Negara. Dengan demikian keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya menjadikan keberhasilan pembangunan lebih mudah dicapai.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2) yang disebutkan : “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dalam penjelasan pasal tersebut Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan propinsi akan terbagi dalam daerah yang lebih kecil, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan Desa memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, namun dalam perjalanannya terkait dengan Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 208 bagian kedua UU. No. 32/2004 tersebut mengatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) berdasarkan peraturan pemerintah. PERDA Kabupaten Bengkaalis Nomor 10 tahun 2008 Bagian keempat tugas pokok dan fungsi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 9 adalah :

- 1) Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- 2) Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Jadi dari bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa kemauan pemerintah pusat untuk menciptakan pemerintahan yang baik sudah optimal. Disini pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai budaya daerah setempat.

Dengan berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahkan Peraturan Daerah banyak instansi-instansi pemerintah daerah yang dalam program kerjanya menyangkut atau berhubungan dengan desa, tapi dilihat dari fungsi instansi pemerintah yang ada yang berkaitan langsung atau yang berhubungan dengan Pemerintah Desa hanyalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Kemudian juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘urusan pemerintahan ‘ antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Kemudian yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat. Sedangkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) PP 72 ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Namun dalam hal ini kita telah menilai bahwa hal tersebut belum berjalan sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya rendahnya Aparatur Pemerintah desa dan juga kurangnya fungsi kontrol masyarakat. Karena kurangnya pantauan dari masyarakat desa menyebabkan aparatur desa dan kepala desa terkadang keluar dari tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian hal ini juga disebabkan minimnya Aparatur pemerintahan. Hal ini tidak bisa hanya dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk mengatur rumah tangga mereka. Dalam hal ini kita tidak bisa menunggu kapan kinerja Aparatur pemerintahan mereka meningkat, namun sangat dibutuhkan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah untuk dapat menjadi fasilitator dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.

Dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama Pemerintah desa agar mereka tahu tugas dan fungsinya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa merupakan sebuah instansi pemerintah yang sangat berperan dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik yang berkerja dalam tatanan kemasyarakatan salah satunya dimasyarakat desa. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sangat dituntut berperan aktif untuk membuat program kerja meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah desa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa merupakan fasilitator dalam usaha pengembangan masyarakat desa yang dapat membantu permasalahan didesa yaitu diantaranya :



1. Kelompok sosial masyarakat desa
2. Organisasi sosial
3. Perubahan Masyarakat desa
4. Proses sosial masyarakat desa
5. Norma dan tata nilai masyarakat desa
6. kepemimpinan masyarakat pedesaan
7. Mobilitas sosial masyarakat desa
8. Mobilitas tenaga kerja masyarakat desa
9. Mata pencarian masyarakat desa
10. Budaya dan sistem religi masyarakat desa

**(Yulianti Yayuk, 2002:17-18)**

Aparatur Pemerintah desa adalah orang-orang yang berada dalam kepengurusan masyarakat desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat-perangkatnya, yang sering disebut dengan aktor-aktor desa.

Dari berbagai teori dan penjelasan diatas salah satu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa terutama ditingkatan Kabupaten yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa, sehingga dalam penelitian ini mengambil Badan PMD ini.

Kepala desa dipilih langsung masyarakat desa, yang telah diatur dan dijelaskan dalam UU RI No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu pada BAB.IX tentang desa.

Pembicaraan tentang otonomi daerah selalu menegasi desa sebagai salah satu daerah otonom. Otonomi daerah pada masa pemerintahan orde baru pada hakekatnya tidak pernah diwujudkan. Orde baru membangun kekuasaan secara terpusat, dan kini terbukti sarat dengan KKN. Upaya untuk mewujudkan otonomi daerah pernah diuji coba

di 24 daerah Tingkat II pada tahun 1994. namun banyak pakar menyebutkan bahwa pilot proyek otonomi daerah ini tidak sungguh-sungguh didesain merealisasikan otonomi daerah itu sendiri.**(Saragi Tumpal P, 2004:27).**

Sampai saat ini desa belum benar-benar bisa berkembang, masyarakat desa masih jauh tertinggal hal ini jelas terlihat dengan kualitas aparatur pemerintah yang ada di desa ini sangat memprihatinkan dalam hal ini kita langsung melihat pemerintah desanya yang menjalani pemerintahan desanya bagaimana bisa berjalan dengan baik kalau kualitas Aparatur pemerintah desa nya masih rendah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga perlunya perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada dasarnya semua ini dapat berjalan dengan bebas yakni pemerintah daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri yang mana dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah membuat Perda untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ini dikarenakan berkat adanya otonomi daerah yang sejalan dengan Visi dan Konsep Otonomi Daerah yakni dengan Desentralisasi kewenangan pemerintahan kedaerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.**(HR. Syauckani, 2002:172).**

Dan juga dengan adanya upaya peningkatan Aparatur agar masyarakat lokal tidak terbentur pada masalah keterbatasan akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan ditingkat pusat.**(Dewantoro Boedi, 2001:45)**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 6 dijelaskan bahwa :

1. Pemerintah desa mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
  - b) Membina kehidupan masyarakat desa

- c) Membina perekonomian desa
  - d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - e) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
  - f) Mewakili desa nya didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum nya
  - g) Mengajukan rancangan peraturan desa bersama badan perwakilan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa
  - h) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan
  - i) Menjaga kelestarian lingkungan hidup di desa yang bersangkutan
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat 1 pemerintah desa mempunyai fungsi :
- a) Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa
  - b) Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
  - c) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - d) Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama Badan Perwakilan Desa.

Dari hal tersebut diatas pelaksanaan tugas dan kewajiban serta fungsi Aparatur Pemerintah Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 15 tahun 2000. dapat dikatakan bahwa sangat besar peran Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri. Untuk dapat mengetahui kegiatan dan realisasi nya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1 : Kegiatan dan Realisasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Di  
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan Yang Dilaksanakan</b>	<b>Realisasi</b>
1.	2009	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan LKMD Pembinaan PKK Pembinaan Karang Taruna Pembinaan Lembaga Adat	60%  60% 55% 50% 55%
2.	2009	Pembinaan Perekonomian Desa	Pembinaan BUMDes Pembinaan UED – SP Pembinaan Koperasi	50% 45% 60%
3.	2009	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa	Pembinaan Siskamling Pembinaan Linmas	60% 50%
4.	2009	Penyusunan dan Pengajuan	Pembuatan Peraturan Desa	70%

		Rancangan Peraturan Desa	Bersama Badan Perwakilan	
		Bersama Badan Perwakilan	Desa	
		Desa		

***Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa***

***Kabupaten Bengkalis, 2009.***

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa program pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa pada tahun 2009 yang dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan kegiatan pembinaan LKMD telah 60% terealisasi. Kemudian kegiatan pembinaan PKK dan Lembaga Adat telah 55% terealisasi dan kegiatan pembinaan karang taruna 50% terealisasi. Untuk program Pembinaan Perekonomian Desa melalui kegiatan Pembinaan BUMDes telah 50% terealisasi, dan kegiatan Pembinaan Unit Ekonomi Desa – Simpan Pinjam telah 45% terealisasi, serta kegiatan Pembinaan Koperasi telah 60% terealisasi. Pada program pembinaan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa melalui kegiatan Pembinaan Siskamling telah 60% terealisasi dan kegiatan Pembinaan Linmas telah 50% terealisasi. Sedangkan pada program Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Desa Bersama Badan Perwakilan Desa dalam kegiatan Pembuatan Peraturan Desa Bersama Badan Perwakilan Desa telah terealisasi 70%.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas terlihat masih sangat rendahnya kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tiap-tiap desa. Hal ini lah yang menyebabkan penulis tertarik, untuk mengambilnya menjadi suatu penelitian, karena melihat betapa pentingnya program kegiatan-kegiatan tersebut dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa. Selain itu penulis juga ingin melihat lebih jauh mengapa dari setiap program kegiatan tersebut masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi.

Dengan kondisi seperti ini sangat dituntut peran dari berbagai pihak desa harus segera diperhatikan terutama kinerja aparatur pemerintah desanya karena merekalah sebagai aktor penggeraknya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka masalah dalam penelitian ini adalah : **Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa masih rendahnya fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam peningkatan aparatur pemerintah desa.

Untuk melihat persoalan Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, penulis menggunakan satu rumusan masalah sebagai berikut : **Bagaimana Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.**

## **I. 3 Tujuan Penelitian.**

1. Ingin mengetahui sejauh mana upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.
2. Ingin mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat dan merealisasikan program yang berkaitan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.
3. Ingin mengetahui manfaat yang dirasakan Pemerintah Desa dari program tersebut.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau informasi bagi pihak-pihak terkait.
2. Hasil penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara yang penulis peroleh.
3. Hasil penelitian ini diharapkan jadi bahan informasi bagi penelitian berikutnya.

## **I. 5     Sistematika Penulisan**

**BAB I                :**        Bab ini disebut pendahuluan. Didalam berisi latar belakang

masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, sistemetika penulisan, dan metode penelitian.

- BAB II : Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang deskriptip teori, kerangka berfikir, hipotesis, konsep operasional.
- BAB III : Dalam Bab ini Penulis akan membahas tentang metode Penelitian.
- BAB IV : Dalam Bab ini Penulis akan membahas tentang gambaran umum tentang kondisi geografis Kecamatan Bengkalis dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- BAB V : Dalam Bab ini Penulis akan membahas tentang Pembahasan hasil penelitian.
- BAB VI : Dalam Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KONSEP TEORITIS**

Dalam upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang baik sangat dituntut aparatur pemerintah yang lebih terutama pada Pemerintah Desa agar mereka tau tugas dan fungsi mereka.

Sebelum mengkaji fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan program peningkatan aparatur pemerintah desa, maka perlu mengetahui beberapa pengertian sebagai berikut :

#### **II.1 Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

##### **a. Pengertian Fungsi**

Fungsi didefinisikan sebagai:1 Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan Kegunaan suatu hal Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya. (**Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003;332)**)

Ada tiga fungsi dari unsur-unsur kebudayaan, yakni: 1) pemakaian yang menerangkan fungsi sebagai hubungan guna antara suatu hal dengan tujuan tertentu; 2) pemakaian yang menerangkan kaitan korelasi antara satu hal dengan yang lain; 3) pemakaian yang menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. (**ME Spiro, 1990:18**).

Bahwa fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa merupakan suatu guna atau usaha, sesuatu yang hendak dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga begitu pentingnya kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahnya, maka sangatlah

dibutuhkan sekali lembaga atau instansi yang mempunyai kemampuan yang baik, dan upaya dapat diartikan sebagai usaha, ikhtisar untuk mencapai sesuatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa upaya sebuah instansi atau lembaga dalam hal ini merupakan suatu usaha dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan kemudian didukung oleh suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang pegawai yang dapat dilihat dari tingkat pengetahuan yang luas dalam melaksanakan tugasnya.

#### **b. Pengertian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Badan adalah 1. Bagian pekerjaan umum yang mengurus pekerjaan tertentu. 2. Suatu organisasi dilingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di daerah. (**Kamus Besar Bahasa Indonesia**).

Dan juga dapat dijelaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik, fasilitator dan sebagainya.

Kemudian dapat juga dijelaskan ini merupakan Instansi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam proses pengembangan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bekerja untuk dapat memberi kekuasaan kepada masyarakat desa untuk menentukan apa yang baik bagi mereka dan dapat membimbing mereka.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yakni upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri sendiri dan lingkungannya secara mandiri.

Dari penjelasan pengertian Peran dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatas ini berkaitan dengan kebijakan yang dibuat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya dalam upaya Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.

Kemudian dapat juga dijelaskan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan instansi pemerintah yang membuat kebijakan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang dimaksud diatas dan juga dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan publik atau kebijakan umum. Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengingat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah ( **Roro Mas, 2005:25**)

Dari beberapa literatur, terdapat dua penggunaan konsep kebijakan dan kebijaksanaan. Kedua konsep ini mempunyai arti yang sama, yaitu serangkaian konsep dan asas yang menjadi konsep yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak (**Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989**)

Pengertian kebijakan mempunyai beberapa implikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

3. Bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

( **Roro Mas, 2005:1-2**)

Seperti yang telah disebut didepan, sebuah kebijakan merupakan produk dari sebuah keputusan. Untuk melaksanakannya, dan dengan harapan dapat tercapai tujuan dari kebijakan tersebut, maka kiranya kebijakan itu diterjemahkan dalam bentuk yang konkrit. ( **Roro Mas, 2005:2**)

Dari pengertian dan penjelasan diatas bahwa masyarakat umum yang dimaksud untuk menerima kebijakan itu adalah pemerintah desa.

Dan kemudian dapat juga dipaparkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis, Dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang nomor 25 tahun1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, dan prinsipnya menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota berdasarkan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dengan memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah kabupaten untuk membentuk lembaga perangkat daerah dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan pasal 68 ayat (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, bahwa pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal ini dapat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis yang mana kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; Pembinaan terhadap cabang dinas dalam lingkup tugasnya. Kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pembinaan desa. Sehingga fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa khususnya dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Desa yakni mempunyai fungsi Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemerintah desa dan pelatihan aparat pemerintahan desa; pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.

Dari pengertian dan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah : Upaya merupakan usaha; ikhtisar untuk mencapai sesuatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan dari instansi pemerintah yang telah diatur dalam peraturan daerah baik itu kedudukan, tugas dan fungsi agar menghasilkan sesuatu.

### **c. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.

Kinerja “Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. menurut (**Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67)**)

“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. **Ambar Teguh Sulistiyan (2003 : 223)**

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. ( **Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34)**)

“Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”. **Barry Cushway (2002 : 1998)**

Kinerja adalah : “ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. (**Veizal Rivai ( 2004 : 309)**).

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”. **Robert L. Mathis (2001 : 78)**.

Berdasarkan pendapat para ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat di ukur secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kemudian dapat di ukur menjadi prestasi.

#### **d. Pengertian Aparatur**

Aparatur Pemerintah desa adalah orang-orang yang berada dalam kepengurusan masyarakat desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat-perangkatnya, yang sering disebut dengan aktor-aktor desa.

## **II.2 Peningkatan Aparatur Pemerintah**

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang artinya lebih, tambah atau atas (**Kamus Besar Bahasa Indonesia**).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan artinya menambah atau mengalami perubahan, mengalami hal yang lebih

Dalam upaya peningkatan aparatur pemerintah desa banyak hal yang dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, pengertian pelatihan pemerintah desa disini adalah suatu pelatihan yang ditujukan untuk para aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dengan peningkatan kemampuan pekerjaan (*job*) pemerintah desa saat ini.

Tujuan pelatihan ini utamanya adalah peningkatan produktivitas atau hasil kerja. Atau dengan kata lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan kerja tiap pegawai. Pelatihan-pelatihan ini mencakup antara lain :

- a. Pelatihan-pelatihan untuk pelaksanaan program-program baru.
- b. Pelatihan-pelatihan untuk menggunakan alat-alat atau fasilitas-fasilitas baru
- c. Pelatihan-pelatihan untuk para pegawai yang akan menduduki *job* atau tugas-tugas baru
- d. Pelatihan-pelatihan untuk pengenalan proses atau prosedur kerja yang baru
- e. Pelatihan bagi pegawai-pegawai baru dan sebagainya.

**(Notoatmodjo soekidjo, 1998:94-95)**

Kemudian dapat ditambah kan tujuan pelatihan dan pengembangan menurut Hendry Simamora dari buku Ambar Teguh yakni :

1. Memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi.
2. Membantu memecahkan persoalan operasional.

3. Mempersiapkan pegawai untuk promosi.
4. Memenuhi pertumbuhan pribadi.

Kemudian dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah desa ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa adalah sebagai mediator dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa hendak nya bersikap *proactive* dalam mewadahi upaya peningkatan Aparatur Pemerintah desa ini.

Selanjutnya dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa ini perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi dalam hal ini pengawasan yang dimaksud melihat dan dalam upaya pengendalian adalah untuk mengatur kegiatan, agar kegiatan-kegiatan organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan rencana. Disamping itu pengawasan juga dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atau pemecahan apabila terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan. **(Notoatmodjo soekidjo, 1998:114)**

Kemudian evaluasi, setelah berakhirnya pelatihan, seyogianya dilakukan evaluasi, yang mencakup :

1. Evaluasi terhadap proses, yang meliputi :
  - Organisasi penyelenggara diklat, : administrasi, konsumsinya, ruangnya, para petugasnya, dan sebagainya.
  - Penyampaian materi diklat, misalnya : relevansinya, kedalamnya, pengajarnya, dan sebagainya.
2. Evaluasi terhadap hasilnya, yang mencakup evaluasi sejauh mana materi yang diberikan itu dapat dikuasai atau diserap oleh peserta diklat. Lebih jauh lagi apakah ada peningkatan kemampuan atau keterampilan, pengetahuan, sikap dari para peserta diklat yakni dalam hal ini adalah pemerintah desa.

**(Notoatmodjo soekidjo, 1998:94-95)**



Dan yang terakhir dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa ini harus didukung dengan fasilitas yang merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa.

Dari berbagai teori manajemen sumberdaya manusia dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah desa memberi petunjuk bahwa ada kegiatan pengelolaan Aparatur Pemerintah desa yang harus dilakukan :

1. Dengan dilakukanya pelatihan-pelatihan
2. Adanya mediator
3. Dilakukanya pengawasan dan evaluasi
4. Adanya faktor pendukung dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah desa

Dari teori-teori dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan Aparatur pemerintah desa adalah usaha untuk menambah atau merubah kearah yang lebih baik.

### **II.3 Pengertian Aparatur Pemerintah**

Yang dimaksud dengan "aparat" adalah badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara. Sedangkan istilah "aparatur pemerintah" diartikan sebagai pegawai negeri; alat negara; aparatur negara. Kata aparatur sendiri berarti perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri).( **Kamus Besar Bahasa Indonesia, : 2008**)

Aparatur negara merupakan alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan.

Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/Kerajaan, Persemakmuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak. Aparatur pemerintah adalah anggota masyarakat yang secara hukum dikukuhkan sebagai abdi negara yang bertanggung jawab atas dasar tugas dan wewenang yang telah diberikan sesuai bidang kemampuannya.

Masyarakat sudah percaya sepenuhnya kepada aparat pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan tugas sehari-hari sehingga mampu menyediakan atau memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau diharapkan oleh masyarakat. Dengan demikian berarti aparat pemerintah berkewajiban untuk selalu mengasah dan meningkatkan kemampuan di bidangnya agar dapat bekerja secara profesional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ukuran profesionalisme dari aparat adalah tingkat efektivitas dan efesiensi produk yang mereka hasilkan. Dengan profesionalisme diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat sesuai target dan sasaran yang dicanangkan. Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu bisa disebut sebagai birokrasi.

Aparatur Pemerintah desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban Selanjutnya pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa (**Kansil, 1991: 197**).

Aparatur Pemerintah adalah alat atau organ-organ yang menjalankan tugas dan kewajiban dalam pemerintahan sesuai dengan peraturan yang ditentukan demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan pelaksanaan pemerintahan yang

dilakukan oleh alat atau organ-organ yang telah ditentukan demi mencapai tujuan ( **Widjaja A.W,1990: 34**) .

Menurut UU 32 Tahun 2004 BAB XI Bagian Kedua Pasal 202 pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu dalam BAB IV Bagian Kesatu, Umum, Pasal 11 yakni Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, Bagian Kedua, Pemerintahan Desa, Paragraf 1 Pemerintah Desa Pasal 12 yakni (1) pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. (2) perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. (3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas a. Sekretariat desa; b. Pelaksana teknis lapangan; c. Unsur kewilayahan. (4) Jumlah perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Dan dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah penyelenggara atau penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang ditentukan yang mana terdiri dari kepala desa dan perangkat-perangkat desa.

## **II.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empiris. ( **Sugiyono, 2006:70** )

Berdasarkan paparan yang dikemukakan sebelumnya maka penulis mengambil hipotesis yaitu : **Diduga Masih Rendahnya Pelaksanaan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa .**

## **II.5 Konsep Operasional dan teknik pengukuran**

### **A. Operasionalisasi Konsep**

Untuk mempermudah dalam menganalisa penulis akan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dikemukakan pada konsep teori.

“Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa adalah usaha yang dilakukan membantu Kepala Daerah dalam hal ini bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan Aparatur Pemerintah dan perangkat-perangkat Desa. Oleh karena itu untuk mengatasi dalam hal rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Desa atau ketidaktahuan perangkat desa atas apa-apa saja tugas dan fungsinya.

Sehingga dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan berbagai program dari berbagai teori manajemen sumberdaya manusia dalam upaya peningkatan Aparatur pemerintah desa dan memberi petunjuk bahwa ada

kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Yakni :

- 1) Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan
  - 2) Adanya mediator
  - 3) Dilakukannya pengawasan dan evaluasi
  - 4) Adanya atau melengkapi faktor pendukung dalam upaya peningkatan Aparatur Pemerintah Desa.
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Baik : Apabila Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selalu di Lakukan Oleh Pemerintah desa
- Cukup Baik : Apabila Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kadang-kadang di Lakukan Oleh Pemerintah desa.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **III.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yakni di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

#### **III.2 Jenis dan Sumber Penelitian**

Jenis penelitian dan Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang berasal dari sampel penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang meliputi pelaksanaan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain sebagainya. Baik para petugas dinas maupun aparatur pemerintah desa itu sendiri
- b. Data Skunder, merupakan data yang diperoleh dari tinjauan pustaka baik melalui buku , jurnal penelitian, laporan yang dikeluarkan, oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa serta bahan yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi bagian yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa dalam Peningkatan Aparatur pemerintah Desa.

Penelitian dilakukan dengan sebuah metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif, yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan peran sebuah kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat desa, yang tentunya menjalankan program kebijakan dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis.

- a. Unit Analisis

Penelitian dilakukan di salah satu lembaga pemerintah yang ada di Kabupaten Bengkalis yakni Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis. Karena unit lembaga ini merupakan salah satu yang bertugas dan mempunyai fungsi untuk meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keputusan Bupati Bengkalis, kemudian penelitian juga dilakukan dilapangan yakni langsung menemui beberapa Pemerintah Desa yang ada Di Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang dirasakan Pemerintah Desa tersebut dari program kerja yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa tersebut.

b. Sumber Informasi

Sumber informasi diambil dari pegawai yang menangani masalah peningkatan Aparatur pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis yakni Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis. Kemudian sebagai sampel diambil 6 desa dengan ketentuan jarak desa dengan ibu kota kabupaten.

### **III. 3 Populasi dan Sample**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2006 : 90).

Adapun yang akan menjadi populasi dari penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di Desanya masing-masing.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasinya itu.

Adapun sampel untuk perangkat desa yang ada di setiap desa di Kecamatan Bengkalis, pengambilan dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* yakni untuk penelitian deskriptif, 10% hingga 20% dari populasi. Gay LR & Airasian (2003:112)

Dalam pengambilan data dengan teknik *random sampling*, populasi diambil secara acak tiap-tiap desa dikumpulkan menjadi satu, dan dipilih sesuai dengan teknik *random sampling*, dan pengambilan sampelnya dengan cara memberikan 20 kertas, 13 berisi 7 yang kosong. Dan apabila populasi tersebut dapat kertas yang berisi jadi populasi tersebut yang menjadi sampelnya untuk tiap-tiap desa.

Untuk lebih jelasnya, tentang jumlah sample dari tiap-tiap desa yang telah terpilih dari 17 desa pada kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**1.2 Tabel Populasi**

No	Nama Desa	Populasi	Sampel	Persen
1	Desa Wonosari	5	3	40%
2	Desa Teluk Latak	5	2	40%
3	Desa Senggoro	5	2	40%
4	Desa Kelapa Pati	5	2	40%
5	Desa Sungai Alam	5	2	40%



6	Desa Pangkalan Batang	5	2	40%
Jumlah		30	13	40%

*Sumber : Data lapangan. 2009*

### **III.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan melakukan atau dengan pihak-pihak terkait dikantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis dan perangkat desa yang terkena dampak dari tugas dan fungsi dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menangani program ini dan Pemerintah Desa yang sedikit banyak telah diberi program peningkatan Aparatur Pemerintah Desa yaitu perangkat desa dilokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan dari berbagai sumber baik itu buku-buku mengenai peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, peraturan pemerintah mengenai kebijakan dalam program peningkatan Aparatur Pemerintah Desa khususnya peraturan perundang-undangan, dan program kebijakan dan pustaka serta makalah yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.

### **III.5 Analisis Data**

Sebagian besar dalam penulisan ini menggunakan analisa kualitatif, yang dari informasi terkumpul, yang dipilah membentuk mengacu pada seberapa besar peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis dalam

hal peningkatan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum dan suatu kenyataan dalam pelaksanaan, dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku relevan.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **IV.1. Keadaan Umum Kecamatan Bengkalis**

##### **a. Keadaan Geografis**

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2<sup>0</sup>30' Lintang Utara - 0<sup>0</sup>17' Lintang Utara dan 100<sup>0</sup>52' Bujur Timur - 102<sup>0</sup>10' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 11.481,77 KM<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503Km<sup>2</sup> dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 Km<sup>2</sup>.

Batas Kabupaten Bengkalis adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km.

## **b. Keadaan alamnya**

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis, dengan curah hujan tahun 2008 antara 651,0-1.092,4 mm/tahun dengan temperatur udaranya berkisar antara 26<sup>0</sup>C-32<sup>0</sup>C.

Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Februari-Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September-Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2005 berkisar antara 25-63 hari/tahun.

Jumlah curah hujan yang tertinggi dalam tahun 2009 tercatat di Kecamatan Bukit Batu yaitu 1.092,4 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah di Kecamatan RangsangSiak Kecil dengan curah hujan 651,0 mm/tah.

## **c. Pemerintahan**

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir.kemuudian pada tahun 2009 kembali terjadi pemekaran di wilayah Kepulauan Meranti, dan sekarang Kabupaten bengkalis memiliki 8 Kecamatan dan 102 kelurahan/desa.

## **d. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Bengkalis keadaan 2008 berjumlah 545.737 jiwa yang terdiri 281.160 jiwa laki-laki dan 264.577 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling

banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 256.108 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rupert Utara yaitu 13.342 jiwa.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 281.160 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 264.577 jiwa. Sex ratio kelihatannya berimbang yaitu 106. Sex ratio yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Mandau, Siak kecil dan Rupert, yaitu 111 dan sex ratio yang paling rendah terdapat di Kecamatan Pinggir yaitu 98.

Penduduk Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang terpadat pada tahun 2008 yaitu Kecamatan Mandau dengan tingkat kepadatan mencapai 273 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rupert Utara merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan 21,23 jiwa per kilometer persegi.

Begitu juga penyebaran penduduk yang terbanyak adalah di Kecamatan Mandau yaitu 34,25 % dan penyebaran yang terendah di Kecamatan Rupert Utara yaitu 1,78 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis.

#### **e .Agama**

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia di jamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dalam pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani oleh falsafah Negara Pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

- a. Kerukunan umat beragama dengan seagama
- b. Kerukunan umat beragama dengan agama lain
- c. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Agama Di Kecamatan Bengkalis

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	74.282	84,5
2	Protestan	727	0,827
3	Katolik	247	0,28
4	Hindu	9	0,010
5	Budha	12.594	14,32
	<b>Jumlah</b>	<b>87.890</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab.bengkalis*

#### **f. Fungsi Serta Struktur Organisasi.**

Wilayah Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa terletak di Jl. Lembaga No. 02, terdiri beberapa ruangan. Jika dirinci luas wilayah menurut luas tanah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan luas gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu luas tanah 2304 M<sup>2</sup> dan luas gedung 600M<sup>2</sup>

Batas Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Bapeda.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Dinas Bupati Bengkalis.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lembaga.

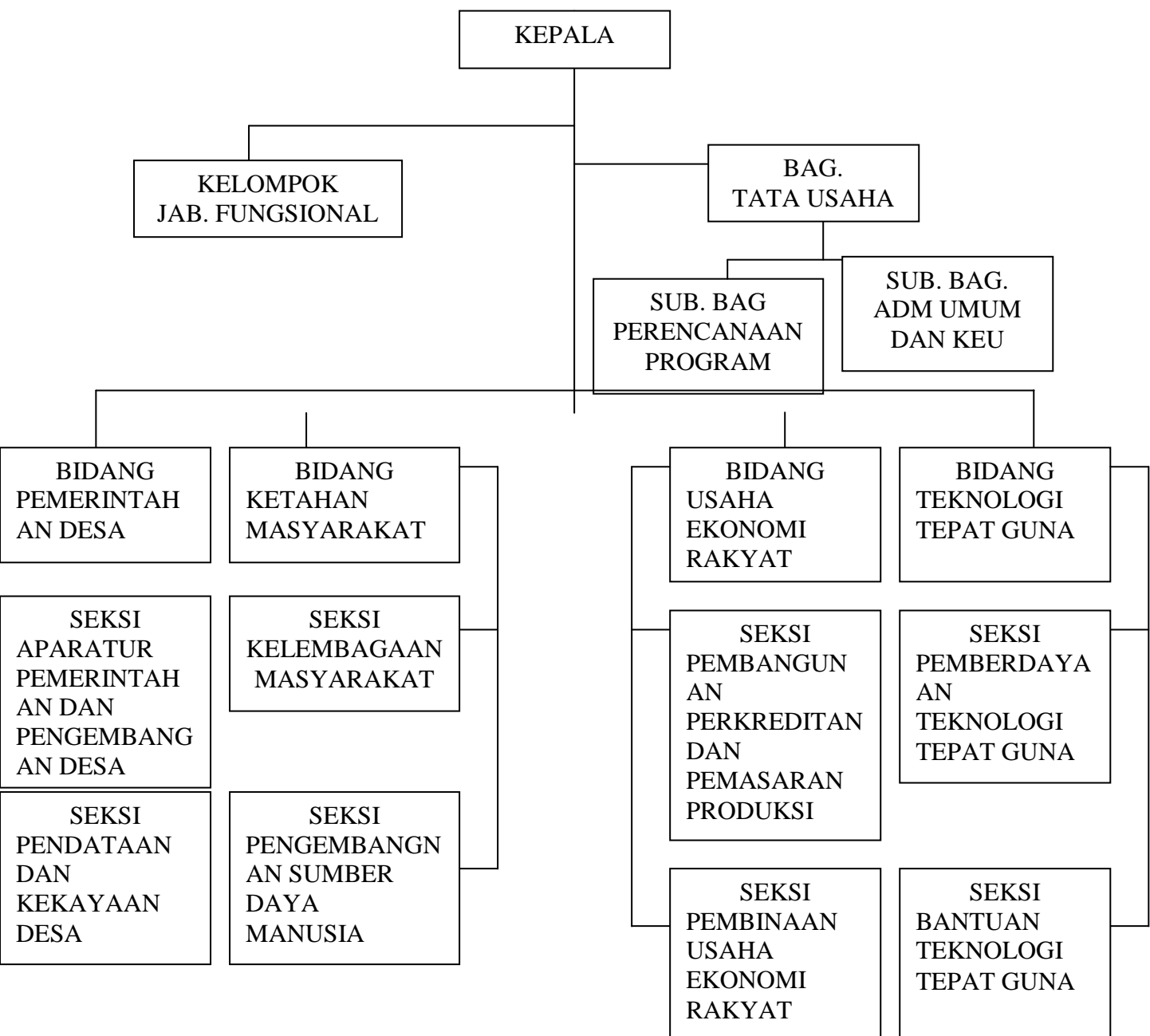
Wilayah sekitar Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan wilayah perkantoran Kab. Bengkalis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur dalam peraturan bupati bengkalis nomor 51 tahun 2005 tentang uraian tugas sub bagian dan seksi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis yang mana peraturan yang berhubungan dalam fungsi peningkatan aparatur pemerintah desa yakni :Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Uraian Tugas Sub Bagian Dan Seksi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis,Bagian Kedua Bidang Pemerintahan Desa Pasal 6, Susunan Organisasi Bidang Pemerintah Desa, terdiri dari : (a) Seksi Aparatur Pemerintahan dan Pengembangan Desa, (b) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa. Pasal 7 Seksi Aparatur Pemerintahan dan Pengembangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan layanan dibidang Seksi Aparatur Pemerintahan dan Pengembangan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas tersebut pada ayat (1) diantaranya sebagai berikut : mengusahakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Administrasi dan Ketertiban Pemerintah Desa, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan aparatur Pemerintah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya, melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan aparatur Pemerintah Desa dan Pengembangan Desa, memberikan pelayanan teknis administrasi aparatur Pemerintah Desa dan Pengembangan Desa, Pasal 8 Seksi Pendapatan Dan Kekayaan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan layanan dibidang Pendapatan Dan Kekayaan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian Tugas Seksi Pendapatan Dan Kekayaan Desa. Yakni diantaranya menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pembinaan tentang tata cara musyawarah desa dalam menyusun peraturan desa (PERDES), menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta pelaksanaan inventarisasi

kekayaan desa dan pemeliharannya, menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

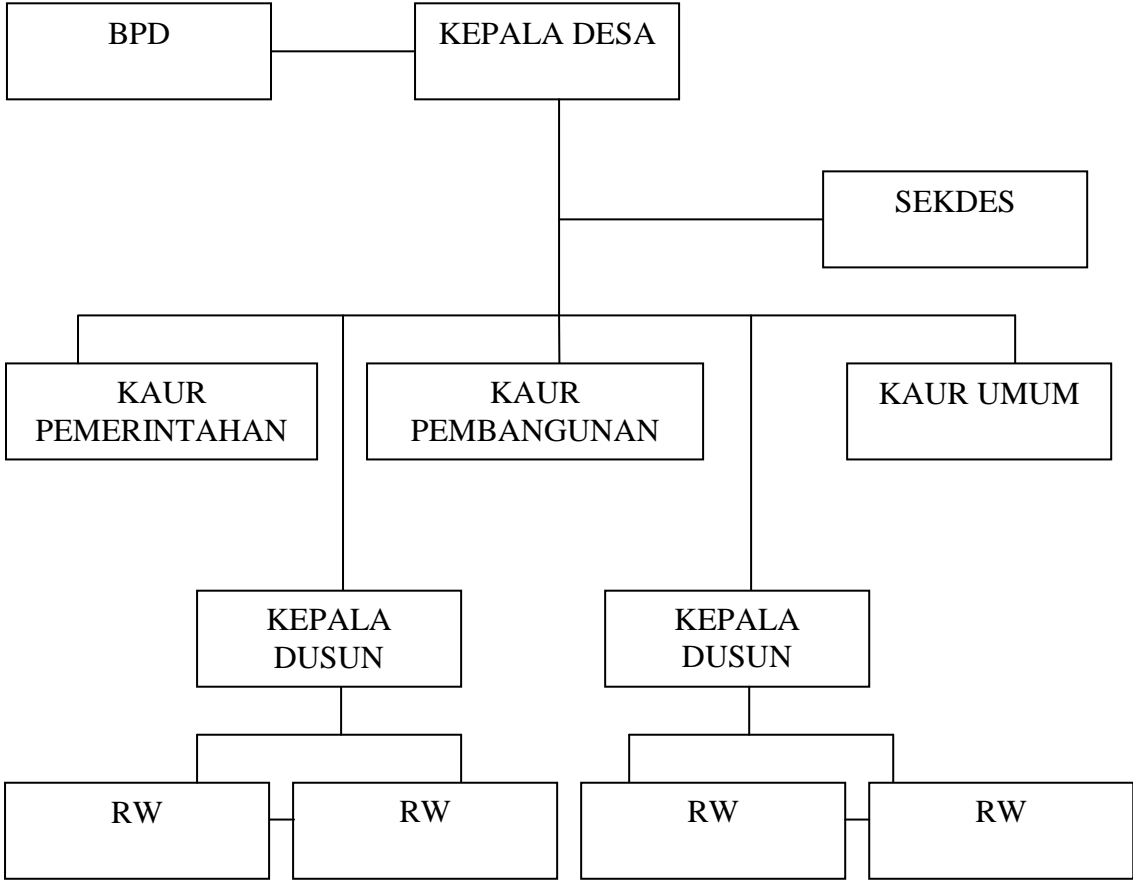
## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA





**Struktur Organisasi Pemerintah Desa:**



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **V.1. Identitas Responden**

Sebelum masuk kepada pembahasan penelitian ini, maka akan terlebih dahulu dibahas tentang responden penelitian. Hal ini dikemukakan sebagai bahan pengetahuan bagi para pembaca dan memperjelas arah penelitian.

Responden dalam penelitian ini semuanya berjumlah 13 orang, yang seluruhnya merupakan pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa sebanyak 7 orang dan dari aparaturnya pemerintah desa sebanyak 6 orang. Berikut tabel mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin responden :

**Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Laki – laki	11	85
2	Perempuan	2	15
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

**Sumber data : Data lapangan, 2010**

Dari tabel diatas dapat diketahui responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 15%, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 85%. Jumlah Responden berjenis kelamin laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan.

Kemudian untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia, Tingkat pendidikan merupakan indikator yang mutlak diperlukan dalam suatu penelitian. Berikut tabel tentang identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	0	0
2	Sekolah Menengah Pertama	0	0
3	Sekolah Menengah Atas	5	45
4	Akademi/Perguruan Tinggi	8	55
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

**Sumber data : Data lapangan, 2010**

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa, tidak ada reponden yang mempunyai latar pendidikan hingga tingkat SD dan SMP. Jumlah responden yang mempunyai latar belakang hingga tingkat SMA adalah berjumlah sebanyak 5 orang ( 45% ), sedangkan responden yang memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat akademi/perguruan tinggi adalah sebanyak 8 orang ( 55%). Jumlah Responden yang memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat akademi/pergurruan tinggi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden memiliki latar belakang pendidikan tingkat SMA.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa namun demikian sebagai bagian pembanding dari permasalahan yang diteliti diambil juga responden dari luar, yang keberadaannya tidak dapat di pisahkan dari tugas dan fungsi BPMPD yakni pemerintah desa. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Jabatan / status**

No	Jabatan / Status	Jumlah/ orang	Persentase (%)
1	Pegawai BPMPD	7	63
2	Pemerintah desa	6	37
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>100%</b>

**Sumber data : Data lapangan, 2010**

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa, jumlah reponden yang berstatus pegawai BPMPD sebanyak 7 orang (63%), sedangkan jumlah responden yang berstatus aparatur pemerintah desa sebanyak 6 orang (37%).

**A. Pelaksanaan Fungsi BPMPD dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.**

. PERDA Kabupaten Bengkaalis Nomor 10 tahun 2008 Bagian keempat tugas pokok dan fungsi dari BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 9 adalah :

1. Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
2. Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah
  - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam wawancara bersama penulis kepala BPMPD Kabupaten bengkalis Drs. Yuhelmi pelaksanaan fungsi BPMPD telah berjalan dengan optimal, sesuai dengan program dan TUPOKSI yang telah di tetapkan. Yang berkaitan dengan peningkatan Kinerja aparatur pemerintah desa lebih ditekankan pada program-program pelatihan, namun tetap dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan sarana dan prasarana baik yang bersifat konseptual maupun teknis dalam rangka menunjang upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.

Program tersebut dinamakan dengan program Pemberdayaan Pemerintahan Desa (PPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

#### **B. Upaya BPMPD dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa.**

Masih rendahnya pengetahuan atau ketidak tahuan Pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya karena kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja aparatur tersebut dan dalam hal ini harus didukung juga oleh elemen-elemen lainnya, di Kabupaten Bengkalis khusus nya Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa baru awal 2004 memberi perhatian lebih terhadap desa terutama peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desanya.

Kendatipun sudah ada perhatian atau usaha untuk peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desa belum secara optimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari administrasi desa belum baik dan yang paling jelas tidak satu pun desa di Kabupaten Bengkalis miliki Perdes padahal itu sangat penting bagi desa sebagai acuan kerja mereka.

Dari beberapa keadaan sebagaimana yang telah dituliskan diatas semenjak Otonomi Daerah pada Tahun 2001 lalu, maka pemerintah Kabupaten Bengkalis telah

melakukan pembenahan terutama peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Desa yakni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan ini tidak juga bisa lepas dari peran aktif dari masyarakat dan elemen-elemen lainnya.

Peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Desa merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya atau terselenggaranya pemerintahan desa yang bisa berjalan dengan baik karena pemerintah desa lah yang menggerakkan tatanan kehidupan di level desa, oleh karena itu dituntut kemampuan baik personal maupun institusi khususnya badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2005, Perda No. 02 Tahun 2001 Pasal 55, tentang peningkatan pengetahuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah desa, Surat Mendagri No. 414.2/603.A/PMD tanggal 14 April 2005 tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, Perda No. 13 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kades dan perangkat desa dalam hal ini dalam upaya peningkatan kegairahan dan semangat kerja serta produktifitas aparatur pemerintah desa dan Surat Mendagri No. 410/1320 SJ tentang peningkatan saran dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintah desa.

### **C.1 Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dengan Bentuk-bentuk pelatihan.**

Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Desa dapat berarti kegiatan untuk merancang dan mengadakan persoalan kedepan atau tahap berikutnya. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bentuk-bentuk pelatihan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis, **Drs. Yuhelmi** bahwa :

*“ Peningkatan kinerja aparatur merupakan PR besar bagi kami di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, yakni di bidang pemerintahan*

*desa untuk lebih spesifik yang menangani hal tersebut yaitu pada Sub.Bidang aparatur pemerintah dan pembangunan desa dan Sub. Bidang pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan SDM pada bidang kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. hal ini telah kami jadikan perhatian khusus mulai dari tahun 2004 lalu, karena Pemerintah Desa Merupakan Aktor penggerak didesa sehingga merekalah yang harus diutamakan terlebih dahulu, karena kinerja aparatur masih jauh dibawah dibandingkan dengan pemerintah desa yang ada dipulau jawa sana, mereka sudah jauh tercerdaskan.” ( Hasil Wawancara 9 Juni 2010 )*

Dalam proses peningkatan kinerja aparatur ini, mekanismenya masih tetap sebagaimana mekanisme yang dulu, baik dalam pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi dan pemberian informasi, namun BPMPD telah memberikan pelatihan-pelatihan yang baru dan peran pemerintah desa sudah mulai muncul dipermukaan, hal ini ditandai dengan keseriusan dan memberikan masukan ke BPMPD sendiri informasi apa saja yang sangat mereka butuhkan.

Sahrial, SH selaku kepala Bidang Pemerintah Desa menambahkan :

*“ Dulu pemerintah tidak memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa dengan alasan Kinerja Aparatur mereka masih rendah dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, kini tidak lagi sedikit banyak mereka sudah tahu tugas-tugas, kewajiban serta hak mereka hal ini kami lakukan dengan memberikan informasi dan pelatihan-pelatihan.” ( Hasil Wawancara 9 Juni 2010 ).*

Dari uraian pendapat diatas menunjukkan bahwa keseriusan BPMPD dalam upaya peningkatan kinerja aparatur ini dengan harapan mereka dapat menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilihat melalui aktivitas instansi ini mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa. Lebih lanjut **Isnaini** selaku Kepala sub.Bagian Aparatur Pemerintah dan Pembangunan Desa menambahkan:

*“ Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur ini kami banyak melakukan dengan cara melakukan pelatihan karena dengan pelatihan mereka lebih cepat tanggap ketimbang kami hanya memberikan buku-buku petunjuk sebagai pedoman mereka yang membuat mereka bingung, dalam pelatihan tersebut dihadiri oleh kepala-kepala desa dan kadang berserta perangkat-perangkatnya dan ini diikuti dengan penjaringan aspirasi hal apa-apa saja yang menjadi kendala mereka.” ( Hasil Wawancara 9 Juni 2010 ).*

Dari hasil wawancara tersebut bahwa BPMPD telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan yakni program kerja bidang Pemerintah Desa baik untuk peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa juga peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Desa diantaranya :

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
3. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Mandiri
4. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Terpilih
5. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dibidang pengelolaan :
  - a. Keuangan desa
  - b. Manajemen desa
6. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
7. Pelatihan Teknologi tepat guna

Mekanisme pelaksanaan, diawali dengan sosialisasi dengan pemberian Surat pemberitahuan kepemerintah desa jadwal pelatihan tersebut yang mana dalam pelaksanaan terdiri dari penyampaian materi serta teknisnya kemudian dengan



memberi pelatihan serta contoh-contoh pendukung. Dalam hal ini BPMPD bertindak sebagai fasilitator kemudian dilanjutkan dengan diskusi apa yang menjadi ketidaktahuan dan kendala mereka. Seperti dalam pelatihan untuk Pemerintah Desa dibidang Administrasi dan pembuatan Perdes ini merupakan target utama yang ingin dicapai karena permasalahan yang harus segera diatasi yakni kondisi administrasi desa yang masih kurang baik dan peningkatan pengetahuan dalam pembuatan perdes sebagai panduan gerak mereka.

Dalam hal mekanisme yang dipakai melalui pemberian pemahaman dan disertai contoh-contoh agar mereka lebih cepat memahami, tinggal mereka merubah sesuai kondisi desa mereka masing-masing.

Dengan berakhirnya pelatihan tersebut bukan berarti tugas BPMPD telah berakhir, jalan masih panjang, masih banyak mekanisme yang harus dilalui, langkah selanjutnya adalah menampung seluruh aspirasi pemerintah desa yang berkaitan dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur dan program-program lain yang tentu program yang telah dilaksanakan di evaluasi dan lihat perkembangannya. Dalam hal peningkatan Kinerja Aparatur pemerintah desa ini bukan hanya kerja dibidang pemerintah desa BPMPD bidang-bidang lain juga mempunyai program peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah desa.

Selain melakukan pelatihan-pelatihan BPMPD juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa seperti yang ditegaskan oleh Sub.Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Peningkatan SDM Idlin :

*“ Dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur ini kami Bagian Sub.Bidang Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM tidak hanya membuat program peningkatan SDM untuk masyarakat Desa umumnya dalam hal ini kami juga*

*membuat program untuk peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, mungkin dalam hal ini kami tidak menyentuh pada tatanan pemerintahannya melainkan pada diri pribadi perangkat desa yaitu dalam bentuk pemberian informasi sehingga kami membuat program pemberian buku tentang desa dan koran masuk desa yang mana setiap kantor Desa mendapatkan Koran gratis setiap hari ( Riau Pos ) karena kami menilai peningkatan Kinerja Aparatur ini tidak hanya dalam pelatihan saja tapi bisa juga melalui kebiasaan membaca sehingga mereka sering mendapatkan informasi-informasi baru. “ (Hasil Wawancara 10 Juni 2010).*

Tindakan atau program yang dilakukan BPMPD ini khususnya bagian peningkatan Kinerja Aparatur yakni dengan menumbuhkan minat baca aparatur desa agar mereka mendapatkan informasi baru yang harus mereka ketahui seperti apa kondisi desa daerah luar. Idlin menambahkan lagi :

*“Banyak program yang telah BPMPD lakukan dan kami perlu perjuangan yang ekstra karena apa budaya kita ini, kita ini orang melayu orang nya manai (pemalas) tidak punya inisiatif inilah yang menjadi permasalahan besar sebenarnya. maka dari itu melihat kondisi yang demikian kami juga harus punya program untuk membangun motivasi pemerintah desa ya.....mungkin dengan pendekatan financial” ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010 ).*

Selanjutnya di Kabid. Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dra. Hj. Hasnila Koesuma menambahkan :

*“ Salah satu bukti peningkatan Kinerja Aparatur pemerintah desa yakni partisipasi pemerintah desa yang aspiratif adalah dimana mereka sudah berani menyampaikan usulan baik yang bersifat lisan, maupun secara tertulis melalui surat kepada Bupati, Dinas-dinas terkait, yang tidak kalah pentingnya adalah usulan masyarakat yang dijamin pemerintah desa disampaikan melalui wakil nya ( DPRD )*

*yang disampaikan pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja kedesa-desa mereka, ini menandai bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsinya.” ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010).*

Dengan menumbuhkan minat baca mereka akan tahu apa yang harus mereka ketahui lagi dan ini akan terlontar keluar dalam ajang diskusi yang dilakukan BPMPD dan ini sudah mulai kelihatan.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sudah berani muncul kepermukaan dan berani menyampaikan aspirasi masyarakatnya. Ini salah satu bentuk system Bottom-up yang menuntut semua usulan. Namun yang mana pada akhirnya harus dibicarakan kembali oleh Dinas / Instansi terkait. Yang menjadi rekapitulasi usulan selanjutnya disebut Usulan Rencana. Dra. Hj. Hasnila Koesuma kembali menambahkan :

*“ Semua usulan yang tertampung dalam Usulan Rencana ( UR ), tidak semua dapat tertampung untuk diusulkan dalam APBD, hal ini dikarenakan : **Pertama**, bisa jadi tidak sesuai dengan skala prioritas yang tertuang dalam arah kebijakan umum dalam tahun yang bersangkutan, **kedua**, terbatasnya dana APBD yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan, **ketiga**, setelah dilakukan peninjauan dilapangan, ternyata itu bukan usulan yang mendesak untuk dilaksanakan. Namun itu semua sudah menjadi bukti bahwa pemerintah desa sudah mulai mengetahui apa yang harus mereka lakukan.” ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010).*

Dengan apa yang telah dibuktikan dengan adanya keberanian Pemerintah Desa bisa mengutarakan apa yang sangat diperlukan masyarakat desa walaupun nantinya akan diproses dulu, namun ini sangat membuat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa lebih giat membuat program yang bertujuan untuk peningkatan Kinerja Aparatur tersebut karena masih banyak PR besar buat BPMPD terutama

dilingkungan pemerintah desa sendiri yang mana perlunya perbaikan administrasi desa dan yang sangat penting acuan kerja mereka yang belum ada yaitu perdes.

### **C. 1. 2. Sebagai Mediator Dalam Upaya Peningkatan Aparatur Pemerintah Pemerintah Desa.**

BPMPD mempunyai peran yang sangat penting didalam perencanaan atau program yang dibuat yang nantinya akan sangat mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Ida Sudarti, Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan mengatakan :

*“ Dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur ini memang sangat dibutuhkan peran aktif dari semua elemen bukan hanya BPMPD, yang mana dalam hal ini BPMPD yang bertanggung jawab dalam hal ini bukan hanya bagian pemerintah desa dan pengembangan SDM saya sebagai kasubag administrasi umum pernah juga terlibat langsung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur pemerintah desa, dalam hal ini saya melihat administrasi desa masih kacau, ya kalau saya menilai ini wajar saja terjadi, karena mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan dan yang baiknya seperti apa, dan ini menjadi sasaran utama kita BPMPD, karena ini berimbaskan pada pelayanan terhadap masyarakat dan ini menjadikan perhatian yang serius bag kita, maka dari pada kami juga membuat pelatihan untuk Pemerintah desa yaitu tentang administrasi desa dan ini terus kami bimbing. ( Hasil Wawancara 10 Juni 2006 ).*

Apa yang diungkapkan oleh Kasubag Administrasi Umum tersebut menunjukkan bahwa BPMPD mempunyai peran bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi satu bagian saja di BPMPD. BPMPD sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa secara structural organisasi sudah sepantasnya mempunyai sumber

daya manusia yang mampu mengakomodir dan memberi solusi atas permasalahan peningkatan Kinerja Aparatur ini.

### **C. 1. Fungsi BPMPD dalam Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Perkembangan kualitas SDM di pemerintahan desa.**

Untuk Mewujudkan peningkatan Kinerja Aparatur, akan menjadi nyata bila pihak BPMPD dalam melaksanakan fungsinya telah membimbing dan motivasi pemerintah desa, dan mengarahkan kearah yang lebih baik.

Kemudian ini tidak hanya sebatas membimbing, memotivasi dan mengarahkan tapi juga melakukan penelitian kebijakan atau program yang dapat mendukung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur ini, yang dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dan kemudian semua ini di awasi lagi sejauh mana perkembangan dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti yang di ungkapkan Sahrial,SH BPMPD kepala Bidang bidang Pemdes :

*“ Dalam upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa ini kami ( bidang pemerintah desa ) selain menyusun, mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis, juga melakukan penelitian dan pengawasan apa-apa saja yang bisa membuat Kinerja Aparatur Pemerintah Desa itu meningkat baik itu motivasi atau cara kerja mereka, yang kemudian kami usahakan untuk memenuhinya, yang tentunya melalui proses. ( Hasil Wawancara 11 Juni 2010 ).*

Pengawasan ini bertujuan untuk mencari lebih jauh apa saja yang menjadi faktor pendukung demi terwujudnya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan bisa menjadi motivasi bagi mereka. Sahrial,SH selaku kepala Bidang Pemerintah Desa menambahkan :

*“ Selain kami meningkatkan Kinerja Aparatur pemerintah desa dalam bentuk pemberian ilmu atau informasi yakni dalam bentuk-bentuk pelatihan dan buku*

*pedoman serta Koran desa tersebut kami juga mempunyai program sebagai pendukung peningkatan Kinerja Aparatur dan program yang bertujuan memotivasi pemerintah desa, yakni kami ketahui setelah kami melakukan penelitian, diskusi, surat mendagri bahkan studi banding” . ( Hasil Wawancara 11 Juni 2010).*

Dengan telah dilakukan berbagai macam kegiatan yang dapat mendukung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan juga dilakukan pengawasan dari apa yang telah diberikan.

Mengevaluasi dan membuat Program jangka panjang atau selanjutnya tidak bisa harus dilupakan karena ini merupakan alat ukur penilaian sejauh mana keberhasilan atau sebaliknya dengan apa yang telah dilakukan dan kemudian dengan program yang sebelumnya telah dilakukan tidk sebatas sampai disitu saja harus ada program lanjutan yang tentunya untuk membuat lebih meningkat yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan dan program yang sebelumnya belum selesai karena membutuhkan waktu yang lama dan ini harus terus dikonsentrasikan agar mendapatkan hasil yang baik.

Evaluasi terhadap hasil kegiatan adalah suatu usaha untuk melihat kembali hasil dari setiap lembaran hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh BPMPD. Tujuan yaitu untuk memberikan penilaian sejauh mana pencapaian hasil kerja berdasarkan rencana dan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bengkalis, Drs. Yuhelmi :

*“ Pada periode tertentu, BPMPD secara keseluruhan bersama bidang dan sub bidangnya, selalu mengadakan evaluasi kegiatan baik secara kelembagaan maupun terjun langsung kelapangan berkaitan dengan pelaksanaan yang dilakukan. Selain itu kami juga akan mendapatkan masukan dari peninjau lapangan yang*

*dilakukan pihak DPRD. Juga melakukan diskusi atau menerima masukan dari Pemerintah Desa sendiri, serta melihat pendapat masyarakat desa atas penilaian pemerintah desa mereka. ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010 ).*

Pendapat tersebut mewakili pendapat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dimana selama ini evaluasi lebih dilakukan melalui kelembagaan, dan kegiatan koordinasi yang dilakukan dengan instansi luar yang relevan dengannya. Adapun evaluasi yang dilakukan secara kelembagaan berdasarkan bidang dan sub bidang merupakan bagian dari kegiatan yang terencana. Serta untuk pembandingan evaluasi tahun sebelumnya.

Di BPMPD mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek khususnya dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur ini, karena ada yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan ada yang dilakukan sekali saja. Seperti yang diungkapkan Isnaini Sub.Bidang Aparatur Pemerintah dan Pembangunan Desa :

*“ Program-program yang kami buat memang belum seberapa karena kami baru sekitar 3 tahun ini benar-benar mengedepankan peningkatan Kinerja Aparatur pemerintah desa yang mana pada tahun sebelumnya masih biasa-biasa saja, dengan telah dia alokasikan dana yang cukup besar untuk desa maka kami punya andil besar bagi pencerdasan Pemeritah Desa agar mereka tahu harus dikemanakan dan utuk apa dana tersebut agar kelak tidak menjadi konflik ditingkat desa, karena sudah saatnya mereka bisa membuat program kerja yang mana itu merupakan kebutuhan desa dan ini tentunya berawal dari peran pemerintah desa dalam membuat program-program tersebut yang merupakan keinginan masyarakat desa itu sendiri, makanya kami tidak bisa berhenti dalam upaya peningkatan ini dan kami mempunyai program jangka panjang.” ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010 ).*

BPMPD mempunyai program yang terus akan dilaksanakan guna terus meningkatnya pengetahuan Pemerintah Desa diantaranya pemberian informasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa atau pemberdayaan pemerintah desa lainnya. Dan ini harus terus dilaksanakan karena masih banyak yang harus mereka ketahui lagi.

Kemudian untuk selanjutnya BPMPD akan membuat 26 desa sebagai *pilot proyek* untuk dijadikan desa contohan otonomi desa diambil 2 desa tiap Kecamatan.

#### **C. 1. 4 Memberikan Fasilitas Pendukung Dalam Upaya Peningkatan SDM**

Dari pernyataan yang diutarakan Sumardi, SE, MM dan Drs. Yuhelmi diatas BPMPD juga membuat program kerja yang dinilai dapat membantu dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur tersebut bahkan itu merupakan sarana pendukung untuk kerja Pemerintah Desa dan membuat suatu kompetisi yang dapat menumbuhkan motifasi pemerintah desa.

Yakni diantaranya : Peningkatan Infrastruktur, yang mana belum memadai sarana dan prasarana serta fasilitas Pemerintahan Desa dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintah desa hal ini berdasarkan Surat Mendagri No.410/320 SJ yakni diantara kegiatannya :

- Pengadaan Sarana Kerja.
- Pakaian Dinas
- Kursi dan Meja
- Mesin Tik
- Komputer
- Honor
- Almari Arsip



- Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor
- Penyediaan Data Base dan Profil Desa/Kelurahan
- Pembangunan Perpustakaan.
- Bantuan Kendaraan Dinas Kepala Desa.

Dan dalam upaya membangun motivasi baik itu dalam bentuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja serta produktifitas aparatur pemerintah desa berdasarkan Perda No. 13 tahun 2000 tentang keuangan kades dan perangkat kerja serta masih rendahnya kinerja pemerintah desa maka dari pada itu BPMPD membuat program Pengembangan Motivasi dan Penataan dan Peningkatan Desa yang mana kegiatannya :

- Pemberian Tunjangan Rutin Bagi Kades
- Bantuan Sagu Hati Kepala Desa yang habis masa jabatannya.
- Uang Duka bagi keluarga Kades yang meninggal dunia.
- Penilaian Lomba Desa

Yang kemudian ditambahkan Isnaini Sub.Bidang Aparatur Pemerintah dan Pembangunan Desa :

*“ Dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang dapat kita lihat dari kinerja mereka tidak cukup dengan hanya memberi pelatihan-pelatihan dan informasi juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mendukung kerja mereka, gimana mau melihat kerja yang baik tapi perlengkapan pendukung belum tersedia, dan ini harus segera dilengkapi... ”.* (Hasil Wawancara 10 Juni 2010 ).

kemudian tambahkan oleh Sumardi, SE, MM :

*“ Memang banyak pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan diantaranya pendekatan teknologi dan financial sesuai perkembangan zaman dan hak-hak yang harus mereka dapatkan dan ini akan kami terus awasi sejauh mana*

*manfaatnya serta perkembangannya yang tentunya nanti akan kita evaluasi”* .( Hasil Wawancara 10 Juni 2010)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa ini tidak hanya dilakukan hanya dengan sebatas memberi pelatihan dan pemberian informasi dalam upaya ini juga harus didukung dengan sarana penunjang agar bisa mengoptimalkan pembangunan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

### **C. Kendala dan Tujuan Utama**

Dalam pelaksanaan program-program pasti ada kendala yang mungkin bisa memperlambat proses tersebut yang mana kadang kendala itu tanpa pernah disadari atau kadang keadaan memang memaksakan hal ini wajar-wajar saja terjadi. Dan tentunya untuk jangka waktu yang dekat punya target awal pencapaian seperti apa yang harus diraih sebelum kita menginginkan tujuan keseluruhannya yakni peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa seutuhnya.

#### **D. 1. 1 Kendala yang dihadapi Dinas PMD dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.**

Seperti yang diutarakan BPMPD yang pernah terlibat langsung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bpk. Udwanizar :

*“ Dalam pelaksanaan program kerja yang dibuat BPMPD terutama dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang menjadi kendala paling besar adalah kondisi wilayah Kab. Bengkalis yang terpisah-terpisah tidak satu pulau yang menjadi masalah adalah jarak yang begitu jauh dan memerlukan dana yang besar sehingga*

*menyulitkan mereka untuk datang ke kabupaten untuk mengikuti pelatihan dan yang sangat disayangkan ada juga Pemerintah Desa yang malas untuk ikut, walaupun kami telah memberi dana tambahan untuk transport dan sebagainya” ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010 )*

kemudian Sahrial, SH selaku kepala Bidang Pemerintah Desa menambahkan :

*” Kendala-kendala yang kami hadapi sudah kami atasi terutama jarak tersebut kami anggarkan dana untuk uang transport dan uang saku mereka, tapi yang masih menjadi kendala kami yakni kekurangan porsenil yang mempunyai pengetahuan lebih tentang pemerintah desa kadang itu kami atasi dengan menghadirkan pembicara dari luar yang tahu tentang pememrintah desa, dan yang paling sulit kurangnya kesadaran pemerintah desa untuk ikut seluruhnya namun ini hanya segelintir pemerintah desa yang lain justru lebih antusias untuk mengikutinya” ( Hasil Wawancara 11 Juni 2010 )*

Dari pernyataan tersebut bahwa yang menjadi kendala mereka adalah kondisi wilayah Kecamatan. Bengkalis yang terpisah-pisah tidak berada dalam satu pulau, kekurangan porsenil dan adanya pemerintah desa yang tak peduli dengan upaya yang dilakukan BPMPD dan yang membuat program yang dibuat BPMPD terlambat dilaksanakan atau bahkan tidak bisa dilaksanakan yaitu tidak disahkan di DPRD sehingga tidak mempunyai anggaran karena penuhnya pertimbangan dan keterbatasan dana .

#### **D. 1. 2 Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dan Manfaat Yang Mereka Rasakan.**

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai Pemerintah Desa untuk mengetahui manfaat dan kendala yang mereka hadapi yang tentunya berkaitan dengan program yang dibuat BPMPD dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Dari program yang di buat BPMPD sedikit banyak bermanfaat bagi pemerintah desa bahkan membawa perubahan seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Wonosari Ruslan bahwa :

*“ Pada prinsipnya Kinerja Aparatur di desa kami cukup tinggi terbukti banyak sarajana didesa ini bahkan ada yang duduk dilegislatif tapi yang jadi masalah mereka tak peduli dengan pemerintahan desa dan ini sangat disayangkan, kalau saya melihat apa yang telah diprogramkan Badan cukup bagus dan kami disini merasakan manfaatnya terutama dalam perbaikan administrasi didesa kami dan infrastuktur serta sarana dan prasarana yang sudah mulai terlengkapi namun yang menjadi kendala kami yaitu terutama dilingkangan kerja kurangnya personil karena kami hanya ada 3 kaur dan ini harus ditambah agar kami lebih baik lagi dalam bekerja ”. ( Hasil Wawancara 10 Juni 2010 )*

Kemudian ditambahkan oleh Bpk. Zulnasri, SH Kepala Desa Senggoro

*“ Pada Program-program yang di buat BPMPD memang sangat bermanfaat bagi kami bahkan kami telah melakukan pembenahan terutama dibagian administrasi yang kini mulai teratur tapi yang menjadi kendala bagi kami yaitu jarak yang begitu jauh antara desa kami dengan pusat Kecamatan kami harus melewati Beberapa Desa lain dan menghabiskan dana sekitar 65 ribu rupiah Pulang pergi, dan kadang pemerintah kurang memperhatikan ini “ ( Hasil Wawancara 11 Juli 2010 )*

Itu merupakan Pendapat kepala desa yang jarak antara desa dengan pusat kabupaten begitu jauh dan itu menjadi kendala mereka.

Namun berbeda dengan penuturan yang dilontarkan seorang Pria yang menjabat sebagai Sekdes di Desa Sungai Alam yang jaraknya desanya dengan pusat kabupaten tidak terlalu jauh di bandingkan dengan Desa Senggoro tadi Bpk. Herman Yahya, SH :

*“ Saya menyambut positif apa yang telah dilakukan BPMPD walau kadang saya tidak ikut pelatihan yang telah dibuat dikarenakan kondisi jalan yang tidak bagus ditambah dengan saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak kecil yang belum bisa ditinggalkan tapi perangkat-perangkat lain tetap ikut dan saya melihat adanya perubahan yang mereka rasakan.” ( Hasil Wawancara 11 Juni 2010 )*

Kemudian penuturan dari kepala Desa Kelapa Pati Bpk.Anhar Noor menjelaskan bahwa*“ Saya menyambut positif apa yang telah dilakukan BPMPD tetapi pada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, mereka selalu menitik beratkan pada aparatur pemerintah,*

Lain lagi halnya diDesa teluk latak kepala desa ini Bpk,Mansur mempunyai pendapat yang beda dia mengatakan bahwa :*“ Pada prinsipnya Kinerja Aparatur di desa kami sangat rendah terbukti banyak penganguran didesa ini di karenakan pada desa ini kebanyakan dari mereka berpendidikan rendah mereka hanya tamat Sekolah Dasar. yang jadi masalah mereka tak peduli dengan pemerintahan desa dan ini sangat disayangkan, karena mereka sama sekali tidak mengerti tentang ini kami ingin Pemerintah melakukan penyuluhan-penyuluhan lebih banyak lagi ke desa-desa yang jauh dari pusat kota supaya masyarakat disini lebih mengerti dan termotivasi. ( Hasil Wawancara 11 Juni 2010 )*

Sedangkan di Desa pangkalan kepala desa Uman megatakan : *“ Saya sangat senang sekali apa yang telah dilakukan BPMPD walau kadang saya tidak ikut pelatihan yang telah dibuat dikarenakan Komunikasi ke desa kami sangat lambat mendapatkan informasi dari Pemerintah kota (Pusat), dikarenakan kondisi di desa kami sangat terpencil dan jauh dari tekhnologi tingkat tinggi. Itu yang selalu membuat kami sangat ketinggalan informasi yang penting. ( Hasil Wawancara 11 Juni 2010 ).*

Dari beberapa wawancara yang saya lakukan rata-rata penuturan mereka sama namun mereka sangat mengharapkan adanya program-program lanjutan yang lebih membuat mereka lebih termotivasi dan menambah wawasan mereka.

Pada kendala yang terjadi terutama masalah jarak, Partisipasi, Komunikasi, tingkat pendidikan yang rendah dan kurang personil seperti yang dituturkan Bpk. Zulnasri Desa Sungai alam, bahwa untuk kepusat Kabupaten harus naik bus dulu melewati beberapa desa dengan Biaya 65 Ribu.

Namun ada juga yang bisa ditempuh pakai motor dan menghabiskan satu atau dua liter bensin.

#### **D. Kendala dan Tujuan Utama**

Dari data yang terkumpul dari 17 kepala desa hanya ada 8 kepala desa yang sarjana baik S1 maupun D3 yang selebnya hanya pada sekolah lanjutan tingkat atas kebawah, memang sampai saat ini kemampuan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Bengkalis masih rendah hal ini ditandai dengan ketidak tahuan Pemerintah Desa apa yang harus mereka lakukan serta kurangnya pelayanan terhadap masyarakat ditambah lagi ketidak jelasan fungsi dari BPD karena sampai saat ini belum satu desa pun di kabupaten Bengkalis yang dibuat oleh Perdes bersama BPD masih banyak kekurangan secara administrasi. Dan ini harus menjadi perhatian seluruh elemen yang bekewajiban dalam upaya peingkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa tidak hanya BPMPD dan kemudian dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa ini memerlukan proses yang cukup panjang.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa adalah membantu Kepala Daerah dalam hal ini bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan Kinerja Aparatur perangkat-perangkat Desa, oleh karena itu untuk mengatasi dalam hal rendahnya Kinerja Aparatur Pemerintah Desa atau ketidak tahuan perangkat desa atas apa-apa saja yang ingin dilakukanya yakni dapat di jelaskan bahwa Kinerja Aparatur perangkat desa masih rendah sehingga mereka susah mengembangkan desa dan tidak mengetahui sepenuhnya fungsi mereka.

Sehingga dalam hal ini dapat di tulis beberapa kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BPMPD yakni dari berbagai teori manajemen sumber daya manusia dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur pemerintah desa memberi petunjuk bahwa ada kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan :

1. Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan
2. Adanya atau sebagai mediator
3. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi
4. Adanya atau melengkapi faktor pendukung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur



Dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa BPMPD telah melakukan berbagai program baik itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pemberian informasi, bimbingan-bimbingan serta factor-faktor penukung lainnya yang dapat menumbuhkan motivasi dan meningkatkan etos kerja Pemerintah Desa yang mana diantaranya pelatihan yang dilakukan :

1. Pelatihan Administrasi Desa
2. Pelatihan Kepala Desa lama dan baru terpilih
3. Pelatihan Perangkat Desa / Sekdes
4. Pelatihan Anggota BPD
5. Pelatihan Tata Naskah Badan
6. Pelatihan Pengelolaan UED-SP
7. Pelatihan Pembuatan Perdes
8. Pelatihan P3MD ( Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa )

Serta program-program pendukung lainnya seperti :

- Pengadaan Sarana Kerja.
- Pakaian Dinas
- Kursi dan Meja
- Mesin Tik
- Komputer
- Honor
- Almari Arsip

- Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor
- Penyediaan Data Base dan Profil Desa/Kelurahan
- Pembangunan Perpustakaan.
- Bantuan Kendaraan Badan Kepala Desa.
- Pemberian Tunjangan Rutin Bagi Kades
- Bantuan Sagu Hati Kepala Desa yang habis masa jabatannya.
- Uang Duka bagi keluarga Kades yang meninggal dunia.
- Penilaian Lomba Desa
- Dan pemberian Koran Gratis untuk pemerintah desa.

Dan juga Program-program yang dilaksanakan ddalam peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa :

- Program Nasional Pemberdayaa Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) Mandiri Pedesaan.
- Program Pemberdayaan Pemerintahan desa (PPD) yaitu dana yang dilaksanakan pada masing-masing desalokasi, yang dipergunakan untuk kegiatan simpan pinjam yang dikelola oleh usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP).
- Program pengembangan tekhnologi tepat guna (TTG)
- Ptogram peningkatan pemberdayaan Aparatur Pemerintahan desa.
- Program Pengembangan Kelembagaan Desa (LPM).

Semua itu bertujuan untuk peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa agar Pemerintah Desa dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

Walaupun tingkat Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan. Bengkalis Dari data yang terkumpul dari 17 kepala desa hanya ada 8 kepala desa yang sarjana baik S1 maupun D3 yang selebinya hanya pada sekolah lanjutan tingkat atas kebawah, memang sampai saat ini kemampuan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dikecamatan Bengkalis masih rendah hal ini ditandai dengan ketidak tahuan Pemerintah Desa apa yang harus mereka lakukan serta kurangnya pelayanan terhadap masyarakat ditambah lagi ketidak jelasan fungsi dari BPD karena sampai saat ini Perdes yang dibuat oleh perdes bersama BPD masih banyak kekurangan secara administrasi dan ini harus menjadi perhatian seluruh elemen yang bekewajiban dalam upaya peingkatan Kinerja Aparatur Pemerinta Desa tidak hanya BPMPD dan kemudian dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa ini memerlukan proses yang cukup panjang.

Namun sekarang mereka sudah mulai beranjak ketahapan yang lebih baik ini ditandai dengan dimana Pemerintah Desa beserta elemen-elemen masyarkat desa suda bisa merembuk atau membuat program kerja yang menjadi kebutuhan mereka dan ini diajukn keKabupaten walaupun nantinya akan diproses terlebih dahulu.

## **B. Saran-saran**

Dari kendala-kendala dan program yang dilakukan BPMPD saya menyarankan agar BPMPD melakukan program tersebut baik itu pelatihan-pelatihan, pemberian informasi, pengawasan dan evaluasi dan

melengkapi fasilitas pendukung dengan sistem jemput bola karena permasalahan yang dihadapi yaitu masalah jarak sehingga alangkah baiknya untuk pelatihan-pelatihan tidak hanya dilakukan di pusat Kabupaten tapi dapat juga dilakukan di tiap-tiap kecamatan sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk ikut pelatihan.

Kemudian untuk materi yang diberikan lebih banyak dan baru ini bisa dilakukan dengan penambahan personil dan tim-tim pendamping dan itu bisa berasal dari akademisi.

Dan untuk kedepan Pemerintah Desa jangan terlalu dimanjakan dengan sering diberikan tambahan dana atau uang saku yang nanti ditakutkan mereka mau mengikuti kalau mereka dapat honor dan ini akan menjadi penyakit bagi Pemerintah Desa dan teru bangun motivasi mereka agar merekalah yang lebih aktif dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur mereka.

Dan untuk Pemerintah Desa harus mempunyai kesadaran yang mendalam akan pentingnya informasi dan Pemerintah Desa juga harus bisa memberikan masukan ke dinas PMD sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka terutama dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi, bekerja secara profesional dan mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Toro, Boedi. 2001. Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Kontek Otonomi Yogyakarta: Medprint Offset
- Ekowati, Lilik Roro Mas. 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta: Pustaka Cakra
- Hr, Syaukani. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negeri Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemn Pendidikan Nasional, Balai Pustaka 2003
- Mangku Negara, Anwar Prabu, 2000. Motivasi Dalam Kinerja. Jakarta: Penerbit Alfabeta
- Me, Spiro. 1990. Otonomi Desa dan Kesejahteraan. Jakarta: PT. Didit Media
- Notoadmodjo, Soekidjo. 1998. Pengembangan Sumber daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis NO. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daera Kabupaten Bengkalis
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis NO. 15 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tat Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis NO. 2 Tahun 2001 Tentang Peningkatan Pengetahuan bagi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Saragi, Tyumpal. 2004 Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternative Pemberdayaan Desa. Jakarta : CV. Cipiruy
- Sugiyono. 2005 Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D Bandung: Penerbit Alfabeta
- Surat Menteri dalam Negeri Republic Indonesia No. 410/1320.SJ Tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Surat Materi dalam Negeri Republic Indonesia NO. 410/1320.SJ Tentang  
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dalam Rangka  
Mendukung Tugas-tugas Pemerintahan Desa

Sulistiyani, Ambar Teguh 2003 Pengaruh Kinerja dalam Peningkatan Etos Kerja  
Sumberdaya : Penerbit Sahanaya

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945

Widjaja, A. W. 1990. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta : PT. Raja  
Grafindo

Yulianti, Yayuk. 2002. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama